

RANCANGAN

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA PPATK, KEPALA BNPT DAN SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal : Rabu, 4 Juli 2018.
Waktu : Pukul 14.45 – 15.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KETUA RAPAT (Drs. H. KAHAR MUZAKIR/F-PG):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI,

Yang sekarang tinggal sedikit, tadi cukup banyak, Pak. Mungkin karena sibuk mengurus ada yang kalah Pilkada dan mengurus pendaftaran Caleg.

**Yang terhormat Kepala BNPT beserta Jajarannya,
Yang terhormat Kepala PPATK beserta Jajarannya,
Yang terhormat Sekjen Mahkamah Konstitusi beserta Jajarannya,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita hari ini dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka membahas anggaran kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III. Kalau masalah kuorum tadi sudah kuorum, Pak. Cuma tidak datang satu fraksi. Semuanya datang tadi, tapi sudah datang, sudah satu sesi tadi mereka bilang mengurus dirinya masing-masing. Nanti mengurus anggaran Bapak-bapak dia bilang tidak terdaftar sebagai Caleg. Jadi kita lanjutkan saja, karena intinya itu kita ingin mengetahui bagi yang menambah anggaran saja. Seingat saya Mahkamah Konstitusi tidak tambah. Jadi Mahkamah Konstitusi sebetulnya tidak perlu hadir hari ini. Kan yang diperlukan hadir yang menambah anggaran saja. Kalau dia sudah anggarannya nyaris 99,9% disetujui, karena dia sudah setuju. Tidak perlu dibahas, Pak.

Bukan kita tidak sependapat dengan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi karena saya tahu kemarin Bapak tidak minta tambah anggaran. Jadi undangan itu sebetulnya untuk yang menambah anggaran dan kita mau tahu apa alasannya saja. Karena ini masih pagu indikatif. Punya Mahkamah Konstitusi ini di pagu indikatif pun dia sudah setuju, apalagi di pagu sementara. Siapa tahu kan ditambah sendiri oleh pemerintah. Sudah dari pagu sementara, kan pagu sementara itu adalah nota keuangan yang disampaikan presiden tanggal 16 Agustus. Sesudah itu dari situ baru kita bahas lagi menjadi pagu tetap. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi sudah bisa tidur nyenyak, siapa tahu dapat berkah tidak minta pun ditambah. Saya pikir oleh karena itu untuk mempersingkat waktu sekali lagi kami ingin menyampaikan yang kita ingin bahas itu yang tambahan anggaran dan alasan Bapak kenapa mau ditambah. Itu saja. Untuk itu kami mulai dengan..., saya pikir jangan terlalu berlama-lama, ini Jam 14.50, kalau bisa Jam 15.30 kita sudah selesai. Setuju tidak? Tadi kita setengah jam juga, Pak. Setengah jam sudah habis 20 menit sudah selesai.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi kita mulai saja dengan BNPT. BNPT kita ingin mengatakan Bapak kalau minta tambahan anggarannya itu berapa, kemudian alasannya, itu saja. Tapi kalau sudah tertulis lebih bagus. Bisa dimulai, Pak? Silakan, Pak.

WAKIL BNPT:

Terima kasih, Pak.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Anggota Dewan Komisi III,
Yang terhormat Pimpinan Lembaga yang hadir pada rapat hari ini, serta
Para Hadirin sekalian,**

Sebelum saya sampaikan, izinkan saya untuk menyampaikan Bapak Kepala BNPT sedang ada kegiatan dengan Menteri Luar Negeri Belanda di Tunggulwulung, Lamongan. Jadi beliau memerintahkan kepada saya untuk menyampaikan ini, Pak.

KETUA RAPAT:

Sehat kan, Pak?

WAKIL BNPT:

Sehat. Nanti saya sampaikan, Pak.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul di sini.

Saya langsung saja, Pak. Ini saya akan menyampaikan sesuai instruksi beliau yaitu tentang pertama pagu indikatif BNPT tahun 2019, lalu kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi pagu indikatif tahun 2019, yang ketiga realisasi penyerapan anggaran tahun 2018, yang keempat satuan tiga tahun 2017. Sesuai dengan Menteri Keuangan, jadi saya langsung pagu anggaran BNPT kegiatan tahun 2019 yaitu alokasi rencananya mendapatkan 699,5 miliar dan seterusnya itu mencakup bidang pencegahan 146,9 miliar, bidang penindakan 117,1 miliar, bidang kerja sama internasional 47,6. Karena memang ini tugas-tugas yang akan diberikan dari tiga deputi, Pak. Ini yang selama ini kita laksanakan. Yang berikut adalah dukungan administrasi 385 juta. Lalu bidang pengawasan internal lainnya 2,5 miliar. Saya ulangi, dukungan administrasi dan SDM 385,2 miliar. Lalu pagu anggaran BNPT yang berupa jenis belanja itu belanja pegawainya 23 miliar, belanja barangnya 400 miliar dan belanja modalnya 276,3 miliar. Sedangkan kebutuhan anggaran yang belum terakomodir dalam pagu indikatif tahun 2019 itu totalnya 155,2 miliar, Pak. Yang pertama peralatan Pusat Pengendalian Krisis yaitu kita menganggarkan 52,2 miliar dimana untuk merealisasikan dari Undang-Undang Pusat Pengendalian Krisis dan Analisis yang ada di undang-undang itu kita akan mencoba untuk menyiapkan peralatan-peralatan dan sebagainya untuk mendukung kegiatan Pengendalian Krisis. Berikutnya peralatan Balai Latihan Pusat Deradikalisasi itu 21,5 miliar. Ini separuh sudah berjalan untuk menguasai tanah di sekitar BNPT yang ada di Sentul. Ini kita akan membangun, tinggal membangun, tanahnya sudah siap, tinggal membangun, lalu nanti akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan para mantan-mantan teroris yang ada di BNPT. Disampaikan sekarang ada 14 teroris yang ada di BNPT Sentul yang sedang kita bina, kita dampingi dan kita berdayakan, sehingga kita akan mencoba untuk bisa meningkatkan, sehingga dia nanti keluar dari BNPT dapat mempunyai praktek kerja. Lalu yang berikut adalah tentunya gedung diisi dengan *furniture* dan sebagainya itu 18,7 miliar. Sebelumnya peralatan balai itu nanti kita akan juga mendukung peralatan seperti *tools*, lalu peralatan-peralatan seperti latihan mereka, sehingga mereka bisa untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan keterampilan.

Yang berikut adalah efektifitas pelaksanaan Satgas cegah, ini 15,7 miliar. Ini kita akan menambah wilayah yang akan kita datangi dikarenakan sudah mulai ada indikasi-indikasi di dalam lembaga-lembaga pendidikan menengah maupun tinggi, sehingga nanti kita turun ke lapangan untuk bisa memberikan atau mencegah dari deradikalisasi yang sifatnya untuk bisa jangan sampai terjadi radikal maupun teroris. Itu sasarannya kepada lembaga-lembaga pendidikan dan wilayah, sehingga kita akan kembangkan.

Yang berikut adalah penambahan struktur organisasi, tugas dan fungsi, itu tahun 2017 itu belum didukung, Pak. Jadi sampai sekarang itu belum didukung. Jadi kami mohon 29 miliar ini untuk mendukung organisasi yang sudah dibentuk tahun 2017. Jadi kami belum mendapatkan itu. Lalu kalau kami lanjutkan dengan adanya undang-undang baru kami nanti juga akan membuat struktur organisasi baru yang membutuhkan biaya 18 miliar, Pak. Jadi semuanya totalnya ada 155,2 miliar. Ini untuk penambahan di tahun 2019.

Kami menuju kepada realisasi penyerapan anggaran tahun 2018, Pak. Sampai...

KETUA RAPAT:

Pak, tadi Bapak sudah dengar kan yang kita bahas itu penambahan saja, tidak bahas yang serapan. Jadi Bapak kalau tidak salah minta tambahan seluruhnya 155 itu kan, itu saja yang kita bahas, dan alasan Bapak tadi sudah Bapak uraikan. Sudah selesai?

WAKIL BNPT:

Kalau begitu terima kasih, Pak Pimpinan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Bagaimana, ada tanggapan tidak? Ini anggaran dia tahun 2018 itu kalau tidak salah berapa itu tahun 2018 anggaran Bapak?

WAKIL BNPT:

505. 2018 505, lalu 2019 669.

KETUA RAPAT:

Bukan, anggaran Bapak tahun 2018 itu berapa? 505 kan?

WAKIL BNPT:

505.

KETUA RAPAT:

Pagu indikatif Bapak di tahun 2019 669, kan begitu. Kemudian Bapak minta tambah 155. Jadi kalau dijumlahkan mungkin sekitar 850. Artinya kalau dari 505 menjadi 850 itu ada tambahan dibandingkan 2018 itu lebih sekitar 350 miliar. Kalau persentasenya hampir 70%, kan kira-kira begitu. Jadi bagaimana, ada tanggapan?

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Pak Ketua...

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Ichsan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih, Ketua.

Rekan-rekan Komisi III, Pak BNPT beserta Jajarannya, PPATK dan Sekjen MK,

Untuk BNPT, karena memang baru BNPT, pertanyaan sekarang ini kan total anggaran atau usulan tambahan yang ada di Komisi III itu dari mitra kerja itu 56,9 triliun yang dibutuhkan. Dari sini kan kita dengan tidak bermaksud untuk masuk ke dalam satuan tiga sepertinya ini untuk dipenuhi seratus persen itu kan tidak mungkin. Tugas kami adalah bagaimana yang paling minimum yang Bapak butuhkan dari 155 miliar ini, mana saja, sehingga ada batas atas 155 miliar, ada batas bawah yang kita coba perjuangkan, kan begitu, sehingga nanti kita mengaturnya atau memperjuangkannya pada Banggar adalah itu. Kalau sekarang kan kita tidak tahu..., sekali lagi dengan tidak bermaksud untuk masuk ke dalam satuan tiga, karena Bapak yang bisa putusan sendiri dari tambahan ini adalah 6 *item*, mana saja yang memang sangat dibutuhkan pada tahun 2019 nanti. Nanti dengan PPATK begitu juga, sehingga ada batas atasnya ini yang disampaikan, ada batas bawah nanti yang kira-kira kita coba perjuangkan. Begitu, Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, memang atas-bawah itu penting, Pak.

INTERUPSI F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA):

Pak Ketua, izin.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA):

Saya kira untuk sementara kita tidak membahas satu-persatu dulu, Ketua. Mungkin semua dulu tamu kita untuk menyampaikan, nanti kita *review* sekalian. Sekaligus, Ketua. Jadi kalau ini khawatir pendalaman nanti. Jadi sampaikan dulu para mitra yang lainnya, baru kita bahas menyusul. Begitu, Ketua. Dengan tidak mereduksi saran yang terhormat Pak Ichsan tadi, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini kita tidak ada bahas, Pak. MK tidak tambah, jadi tidak usah dibahas. Mungkin Bapak tadi tidak dengar. Kemudian Bapak ini cuma mau tambah yang tadi, dia alasannya sudah jelas, jadi tidak usah dibahas. Kalau mau bahas silakan. Tinggal PPATK sekarang itu. Jadi apa yang mau dibahas

F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA):

Ya, Pak Ketua. Seandainya hanya BNPT yang menambah berarti kita (suara tidak jelas). Kalau yang lainnya tidak ya bisa kita masuk. BNPT ya fokus itu. Itu, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Karena BNPT sudah, kita lanjutkan dengan PPATK. Yang mau kita tanyakan penambahan dan alasan.

KEPALA PPATK:

terima kasih, Pak Ketua.

**Yang kami hormati Ketua Komisi III, Kakanda kami tercinta H. Kahar Muzakir,
Yang kami hormati para senior yang ada di sebelah kanan,
Yang kami hormati yang sebelah kiri,**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*
Salam sejahtera untuk kita semua.**

Karena ini diminta *to the point*, jadi kami langsung saja, Pak. Alokasi anggaran tahun anggaran 2018 itu Rp131.004.000.000,-. Kemudian pagu indikatifnya naik 3 miliar, sehingga menjadi Rp134.489.223.000,-. Karena perubahan sasaran strategis dan berbagai kegiatan perluasan kegiatan, maka kami mengusulkan tambahan pagu saat ini adalah Rp56.400.000.000,- dengan rincian penggunaannya atau alasannya adalah:

1. Untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama nasional dan internasional sebanyak Rp2.000.000.000,-. Ini penting, karena PPATK itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada dukungan kerja sama dari nasional maupun kerja sama dengan internasional. Karena pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme itu umumnya lintas batas negara.
2. Kita akan menggunakan tambahan tersebut untuk memperbaiki sistem pelaporan dan analisis *Go AML (Go Anti Money Laundering)* sebesar Rp31.000.000.000,-. *Go AML* ini nama dari sistem, dari aplikasi yang dibuat oleh PBB. Jadi ini dibuat secara internasional. Bukan oleh perusahaan provider, tetapi oleh UN ODC. Jadi lembaganya PBB untuk kejahatan korupsi dan tindak pidana lainnya. Salah satu tugas utama PPATK ini sesuai dengan undang-undang untuk mengelola data dan

informasi sebagai bahan proses analisis. Ini sampai akhir Desember 2017 laporan tim PPATK dari pihak pelapor itu sudah 52.912.629 laporan dan ini sangat besar sekali, sehingga kami rasakan sistem dan aplikasi yang saat ini ada ini sudah kurang *up to date* lagi, sehingga dia harus kita ubah. Sistem yang sekarang dibangun sendiri oleh PPATK bekerja sama dan mendapat dukungan dari Austrac (PPATK-nya Australia) sejak berdiri, Pak Kahar. Sejak berdiri tahun 2002 sampai sekarang lebih kurang 16 tahun.

3. Tentu pada saat sistem ini berlaku ini harus didesiminasi mengenai implementasinya kepada pihak-pihak pelapor kita.
4. Akan dilakukan pelaksanaan *national risk assessment* sebesar Rp3.000.000.000,- dengan penjelasan untuk NRA (*National Risk Assessment*) itu kami mungkin perlu sampaikan singkat saja, NRA itu sebagaimana lazimnya di pelaksanaan suatu kegiatan di era yang modern ini, karena sumber daya kita yang terbatas tidak mungkin kita tidak melakukan *risk analysis*. Jadi kita melakukan analisa risiko, sehingga sumber daya yang terbatas tersebut lebih bisa difokuskan. NRA kita itu di Indonesia ini dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang nomor satunya itu adalah korupsi, nomor keduanya narkoba, nomor tiganya kejahatan perpajakan, keempatnya kejahatan kehutanan, kejahatan pasar modal dan seterusnya. Jadi ada sepuluh ini. Ini disusun berdasarkan *national risk assessment* tadi dengan mengundang berbagai perguruan tinggi, kementerian/lembaga yang bersangkutan, kemudian para penegak hukum, sehingga disusunlah *national risk assessment* tadi.
5. Untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Rp5.000.000.000,- dengan penjelasan peningkatan kompetensi SDM PPATK ini sangat penting, terutama untuk mengikuti pesatnya perkembangan modus pencucian uang terakhir ini yang disebut dengan Fintech (*Financial Technology*), *cryptocurrency*, meningkatnya peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, semakin rumitnya sel-sel pendanaan terorisme, semakin kompleksnya modus korupsi, perkembangan ekonomi global dan sebagainya. Oleh karena itu SDM kita ini kita tingkatkan untuk antara lain tambahan alokasi anggaran bagi peningkatan kompetensi SDM, kemudian akan digunakan pemberian beasiswa S2 *short cost* ke IFU dari arah lain, *finansial inteligent negara* unit negara lain, kemudian dilakukan *join analysis*, pemeriksaan, malakukan analisis bersama dengan negara-negara lain, baik kawasan Asean maupun kawasan dunia.
6. Ini adalah untuk memenuhi sarana prasarana terkait (suara tidak jelas) komputer yang sudah rusak dan perbaikan gedung kantor Rp6.200.000.000,-.

Sebagaimana dimaklumi PPATK itu dibangun tahun 2007. Untuk itu terima kasih banyak kepada Bapak-bapak DPR yang selama ini mendukung kami. Tahun 2007 dibangun. Sekarang 2018, ada 11 tahun. Saya inginnya sekali-sekali Bapak-bapak Komisi III datang ke sana untuk melihat. Gedungnya bagus, Pak Kahar. Jadi kita cukup berbangga hati dan terima kasih kepada Anggota DPR, kepada pemerintah, sehingga kalau ada kunjungan dari negara lain kita tidak malu-malu dan tidak perlu ke hotel untuk melakukan pertemuan dan sebagainya. Tapi peralatannya itu belum pernah kita perbaiki. Oleh karena itu kita perlu tidak banyak-banyak, 6,2 M saja untuk peralatan komputer dan pembaruan ruang kerja, kemudian juga untuk peralatan kerja pendukung lainnya.

7. Ada pembebasan lahan tanah, bangunan di lingkungan Pusdiklat. Lagi-lagi kami terima kasih Komisi III itu pada tahun 2016 satu-satunya yang diizinkan membangun gedung oleh DPR dan pemerintah. Kita waktu itu dapat Rp98.000.000.000,-, bangunannya itu tanahnya sekitar 9.000 m² dan dibangun menjadi sekitar 12.000 m² dan barangkali itu merupakan Pusdiklat atau kami menyebutnya *Indonesia Financial Intelligent Institute*. Itu mungkin yang *Intelligent Institute* keuangan yang terbesar di asia barangkali. Ini ada 12.000 m². Bisa tidak disorotkan itunya ya yang gambaran gedungnya itu? Hanya saja di tengah-tengah yang 9.000 itu, tanah-tanah ini dikasih oleh Kementerian Keuangan. Ini sisa eks-BPPN, eks-BPPN dulu, tanahnya ini besar. Par Irsan ini sangat hafal dengan eks-BPPN dulu. Ini ya, Pak Irsan. Bagunan yang bagus ini di tengah-tengahnya di dekat yang merah ini ada rumah, Pak. Karena ini dulu sitaan BPPN dari developer. Dia sudah sempat menjual rumah sekitar 7 atau 8 rumah. Ini yang mau kita beli, ada 8 rumah. Inilah yang kami mohonkan bantuan Bapak-bapak ada tidak gambar rumah itu di layar yang itu. Ini ada sekitar 8 rumah di dalam kompleks kita itu. Kalau ini bisa kita beli, ini mudah-mudahan kita akan menjadi utuh, sehingga di dalam pagar itu tidak ada bangunan yang lain. Ini dibutuhkan Rp8.200.000.000,- untuk 8 rumah itu.

Jadi demikian keseluruhan penggunaannya. Sekali lagi kami mengharapkan betul dukungan dari Bapak-bapak sekalian. Jumlah yang kami minta tersebut bagi kami cukup besar kalau untuk pribadi, tapi untuk kepentingan kita bersama perbaikan dari organisasi kita, penampilan kita, yang paling penting adalah *performance* PPATK itu sendiri, maka Rp56,4 miliar ini betul-betul sangat kami butuhkan dan memohon dengan hormat dukungan dari Bapa-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Saya kira demikian yang dapat kami laporkan.

***Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jadi minta tambahan Rp56 miliar, yang tadi minta tambahan Rp355 miliar, iya? Jadi MK barangkali apakah masih mau bicara? Karena kalau mau silakan. Karena dtk minta tambahan dia, sudah cukup, malah kelebihan. Pagu indikatif saja sudah cukup, apalagi masuk pagu sementara. Kalau ditambah lebih dari cukup. Jadi kita persilakan kepada Bapak/Ibu yang ingin bertanya tentang yang tambahan-tambahan tadi itu, walaupun sudah dijelaskan. Mudah-mudahan Bapak/Ibu waktu menjelaskan tadi bisa mengikuti karena juga tertulis. Kalau PPATK ditayangkan pula, jadi jelas sekali. Kami persilakan kalau masih ada. Cukup? Setuju? Jadi kelihatannya Ketua Banggar ini sangat kooperatif, Pak. Karena Ketua Banggar kita ini yang Anggota Banggar di Komisi III. Di sini dia anak buah saya. Di sana dia ketua, tapi dia melaksanakan dari sini. Itu bukan kata saya, kata undang-undang.

Karena tidak ada pertanyaan saya kira... Kan sudah dijelaskan, artinya sudah jelas kan, kalau memang sudah jelas tinggal kita buat surat nanti. Sudah tentu kita akan

Rapat Pleno, mendengarkan *statement* dari (suara tidak jelas) besok. Tanggal 6 kan paling akhir. Kita sudah *dateline* tanggal 6, kita kirim ke Pak Aziz, *tekeng* dulu, sudah *tekeng* ke Ketua, Ketua di situ waktu bagi-bagi mudah-mudahan porsi kita tidak berkurang. Karena Bapak PPATK kan mantan Sekjen Kementerian Keuangan juga. Berputar-putar dunia ini, Pak. Sudah Sekjen menjadi Irjen kalau tidak salah. Sekarang jadi jenderal dia di PPATK.

Baiklah, kalau demikian kalau tidak ada dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamiin* pertemuan kita pada hari ini kita akhiri.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.20 WIB)